

PERUBAHAN KEBIJAKAN
**REFORMASI
BIROKRASI**
DALAM MENURUNKKAN
TINGKAT KEMISKINAN

OLEH : Ulfa Binada,
Zulia Antan Ambarsari
Auliya Fasya Rahmat Sanusi



20
23 POLICY
P
R
I
E
F





CPDS
Center of Policy and Development Studies





CPDS
Center of Policy and Development Studies



The logo of the Center of Policy and Development Studies (CPDS) is a large, light blue watermark in the background. It features a stylized open book at the base, with a circular emblem above it containing a building facade and a sun-like symbol.

Perubahan Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Author :

Ulfa Binada, S.I.P (ulfabinada@gmail.com)

Zulia Antan Ambarsari, S.Sos (zuliaantan@gmail.com)

Auliya Fasya Rahmat Sanusi, S.P.W.K (fasyafasy@gmail.com)

CPDS
Center of Policy and Development Studies



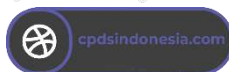
We would like to thank

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
Kementerian Sosial
Kementerian Tenaga Kerja

Center of Policy and Development Studies

Copy editor

Andre Pratama S, S.T





CPDS

Center of Policy and Development Studies



Perubahan Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Tim Penyusun

Ulfa Binada, S.I.P (ulfabinada@gmail.com)

Zulia Antan Ambarsari, S.Sos (zuliaantan@gmail.com)

Auliya Fasya Rahmat Sanusi, S.P.W.K (fasyafasy@gmail.com)

Kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Kementerian Sosial

Kementerian Tenaga Kerja

I. Ringkasan Eksekutif

Kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia karena angka kemiskinan masih tinggi meskipun segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57% artinya terdapat kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan Maret 2022 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Pada tahun tersebut, Indonesia bahkan masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia berdasarkan data Finance Magazine dan World Population Review. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan perubahan Reformasi Birokrasi (RB) dari RB General menjadi RB Tematik. RB Tematik bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada tingkat hilir guna mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional melalui percepatan penyelesaian isu nasional, salah satunya ialah isu kemiskinan. Pemerintah telah memiliki 3 sasaran program untuk mencapai tujuan penurunan angka kemiskinan meliputi penurunan beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan dan kapasitas penduduk miskin, dan meminimalkan wilayah

kantong kemiskinan. Dalam tulisan ini, penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk berbagai instansi pada tingkat pusat dan daerah yang bertanggungjawab dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

II. Pendahuluan

Kondisi Umum Tingkat Kemiskinan di Indonesia

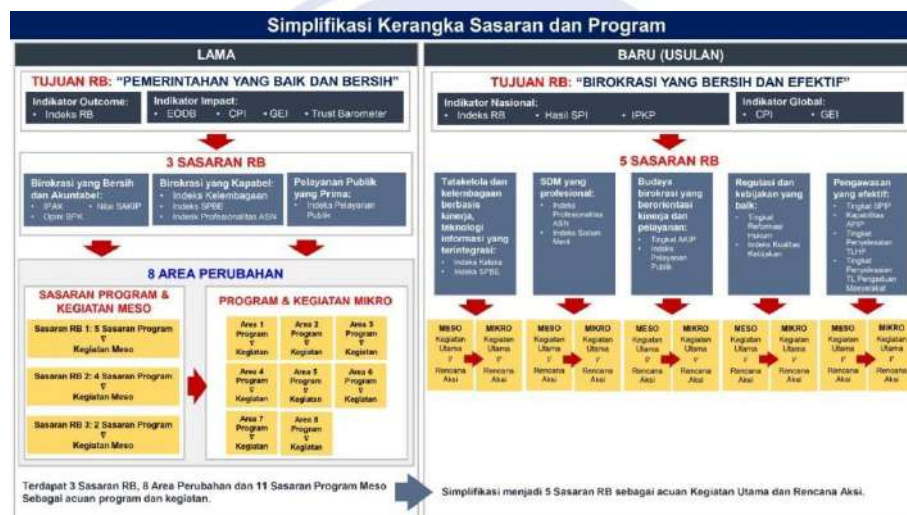
Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp. 525 triliun pada tahun 2021 untuk program pengentasan kemiskinan (TNP2K, 2021). Anggaran tersebut dikeluarkan untuk dua program, yaitu program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi dan program untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi. Upaya pengentasan kemiskinan tersebut difokuskan pada 7 provinsi dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang telah mewakili 20 persen dari total penduduk Indonesia yaitu sebesar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Tujuh provinsi yang difokuskan dalam program pengentasan kemiskinan meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Upaya ini cukup membuahkan hasil, jumlah penduduk miskin pada September 2021 menjadi 9,71 persen yang artinya mengalami penurunan sebesar 0,43 persen terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik Nasional, 2022). Namun, ternyata pada tahun berikutnya terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2022 terhadap Maret 2022 sebesar 0,03 persen dengan total penduduk miskin sebesar 9,57 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Angka tersebut sebenarnya telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2021 sebesar 0,14 persen, namun idealnya jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya di tahun yang sama.

Pada tahun 2022, Indonesia bahkan masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Tentunya hal ini bukan merupakan prestasi yang dapat dibanggakan. Berdasarkan data Global Finance Magazine, Indonesia menduduki peringkat 91 sebagai negara termiskin di dunia. Pemeringkatan tersebut berdasarkan dari jumlah GDP-PPP (*Gross Domestic Product-Purchasing Power Parity*) atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Berdasarkan data tersebut, Indonesia tercatat memiliki nilai GDP-PPP sebesar US\$ 14,535. Sedangkan, berdasarkan data World Population Review, Indonesia menempati peringkat 73 sebagai negara termiskin di dunia berdasarkan perhitungan jumlah Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/*Gross National Income* (GNI) per kapita sebesar US\$ 3,870 pada tahun 2020. (Ventura, 2022; World Population Review, 2023)

Reformasi Birokrasi Tematik sebagai Solusi Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia pada saat ini sedang melakukan strategi baru dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dari Reformasi Birokrasi (RB) General menjadi RB Tematik. Perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2023 melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. RB General bertujuan mengatasi permasalahan pada tingkat hulu atau tata kelola pemerintahan guna memperbaiki manajemen internal pada seluruh instansi pemerintah. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah, serta menciptakan budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan, RB Tematik bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada tingkat hilir guna mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional melalui percepatan penyelesaian isu

nasional, khususnya mengenai pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah. Meskipun RB Tematik menjadi fokus utama pada saat ini, namun setiap instansi tetap harus menjalankan RB General karena permasalahan pada tingkat hilir dianggap sebagai turunan dari permasalahan pada tingkat hulu. Pelaksanaan RB General dan Tematik secara bersama-sama ini disebut dengan istilah “double track”. (PANRB, 2022, 2023b, 2023a)



Sumber: (PANRB, 2023b)

Penjajaman Road Map Reformasi Birokrasi ini dikarenakan Road Map sebelumnya belum efektif dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pencapaian pembangunan nasional yang dimaksud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pelaksanaan RB sebelumnya pada tingkat nasional maupun instansional belum berfokus pada isu strategis nasional karena masih parsial pada masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, pelaksanaannya juga belum optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Terdapat 4 hal utama utama yang dianalisis

dalam upaya sinergi, integrasi, dan penyederhanaan komponen-komponen indikator indeks yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi tersebut dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB (PANRB, 2023a).



Sumber: (PANRB, 2023b)

Dalam mekanisme kerja RB Tematik, setiap institusi pusat hingga daerah harus memiliki tema prioritas yang berdasarkan permasalahan di masyarakat dan tentunya sesuai dengan isu strategis nasional. Terdapat 7 tahapan dalam mekanisme kerja RB tematik seperti gambar di atas. Mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan capaian yang lebih baik dari RB sebelumnya. Baik RB General maupun tematik sebenarnya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu meningkatkan kepercayaan publik, tercapainya target kinerja pembangunan nasional, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik. Salah satu persoalan yang sangat menarik yang menjadi prioritas nasional dalam RB tematik ialah persoalan kemiskinan. Dalam pengelolaan pengentasan kemiskinan, RB Tematik memiliki indikator sebagai alat pengukuran sasaran. Indikator kemiskinan tersebut

mengacu pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan. Data tersebut secara periodik dikelola oleh TNP2K dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan dalam upaya pengentasan kemiskinan, terdapat 3 sasaran yang menjadi faktor-faktor untuk pencapaian tujuan yaitu penurunan beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan dan kapasitas penduduk miskin, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Sedangkan terkait program, identifikasi masalah, dan rencana aksi dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Sumber: (PANRB, 2023b)

III. Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, agenda reformasi birokrasi ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak dari tingkat pusat (kementerian dan lembaga) hingga tingkat daerah (pemerintah daerah). Rekomendasi kebijakan membutuhkan peran berbagai instansi yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu instansi koordinator (TNP2K dan TKPD), instansi pengampu substansi reformasi (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpanrb, BPS, Kemensos,

BKN, Kemenkumham, BPKP, ORI), dan instansi pelaksana (16 Kementerian/Lembaga terkait, OPD, Instansi APH, dan APIP Pemda). Berikut ini beberapa rekomendasi kegiatan bagi pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia:

1. Menyusun arsitektur kinerja, *cascading* kinerja dan peta strategi Program Nasional Pengentasan Kemiskinan untuk acuan bersama Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) dalam menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
2. Menelaah sinergitas program pengentasan kemiskinan di K/L dengan program pengentasan kemiskinan di Pemda dengan melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam fase *planning & budgeting*.
3. Melakukan rekonsiliasi data penduduk miskin nasional antar sektor, yaitu data kependudukan, data BPS, data yang dimiliki oleh K/L/P pengampu program kemiskinan. Rekonsiliasi data terkait dengan jumlah, nama dan alamat, kategori kemiskinannya, dan kelompok usia. Program ini bertujuan menciptakan satu data kemiskinan yang lengkap dan akurat untuk digunakan bersama dalam menyusun strategi pengentasan kemiskinan yang kolaboratif.
4. Membangun sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dari tingkat *ultimate outcome* sampai pada penggunaan input sehingga dapat mendukung evaluasi kinerja dengan berfokus pada pengukuran efisiensi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
5. Meningkatkan kualitas monev kinerja yang dilakukan masing masing K/L meliputi Kementerian PP/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan TNP2K sampai pada evaluasi capaian kinerja yang mengukur efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan. Selain itu, diperlukan pembangunan sistem dan metode monev kinerja berbasis TI yang terintegrasi dengan sistem monev, perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta sistem monev yang dimiliki pemerintah daerah.

6. Membangun metode dan sistem pengumpulan data kinerja pada berbagai level dan didukung dengan sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis TI.
7. Menyusun peta proses bisnis program nasional pengentasan kemiskinan yang selaras dengan arsitektur kinerja, *cascading* kinerja dan peta strategi program nasional pengentasan kemiskinan.
8. Memetakan kebutuhan SDM yang mengampu program pengentasan kemiskinan pada setiap sektor meliputi aspek jumlah, kualifikasi kompetensi teknis, dan integritas. Hasil pemetaan digunakan merencanakan pemenuhan jumlah dan kualifikasi kompetensi teknis dan integritas ASN.
9. Melakukan kajian dan pemetaan regulasi terkait program pengentasan kemiskinan.
10. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pada masing-masing K/L/P dalam mengawal perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, serta mengoptimalkan kolaborasi pengawasan fungsional dan masyarakat.
11. Melakukan evaluasi atas pedoman pelaksanaan pemberian bantuan pada masing-masing K/L/P.
12. Melakukan survei persepsi kualitas pelayanan kepada penerima Bansos dan mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021*.
- PANRB. (2022). *Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia*.
- PANRB. (2023a). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.
- PANRB. (2023b). *Usulan Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 (PPT)*.
- TNP2K. (2021). *Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun 2021*. Tnp2k.Go.Id. <https://tnp2k.go.id/acceleration-policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021#:~:text=Sesuai data dari Kementerian Keuangan,2021 mencapai Rp.526 triliun.>
- Ventura, L. (2022). *Poorest Countries in the World 2022*. Global Finance Magazine. <https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/the-poorest-countries-in-the-world>
- World Population Review. (2023). *Poorest Countries in the World 2023*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poorest-countries-in-the-world>



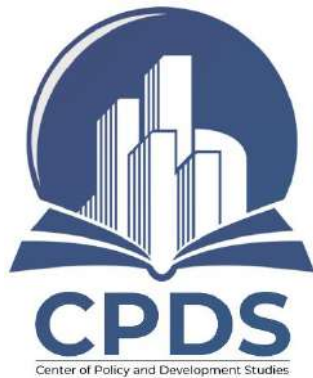
CPDS
Center of Policy and Development Studies





CPDS
Center of Policy and Development Studies





A Policy Brief By CPDS Indonesia

*Ufa Binada, Zulia Antan Ambarsari,
Auliya Fasya Rahmat Sanusi*

***Center of Policy and Development
Studies***

*Center of Policy and Development
Studies is a scientific organisation in
the academic field. The CPDS
focuses on policy and development
studies through research,
publications and other academic
activities such as conferences,
debates and scientific seminars.*

*The author(s) welcome comments
on the present form of this Policy
Brief. The Views expressed here are
those of the author(s) and are not
intended to be attributed to CPDS
Indonesia*

*Copyright © 2023 by Center Of
Policy And Development Studies*